



# RENCANA KERJA

TAHUN 2025

DINAS KELAUTAN  
DAN PERIKANAN



## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, maka daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah masa depan peradaban bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipandang sebelah mata, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan. Oleh sebab itu pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang terletak di pantai barat Sumatera dengan potensi kelautan dan perikanan yang cukup menjanjikan sebagai salah satu sektor pendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Dengan potensi yang besar, kelautan dan perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan

peningkatan taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan lainnya dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan.

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Indonesia, pemerintah baik daerah maupun pusat dituntut untuk menggali sumberdaya yang ada sebagai sumber ekonomi baru dan terbarukan sehingga dapat bersaing secara kualitas dan kuantitas dengan Negara Asean lainnya. Salah satu diantaranya yaitu sektor kelautan dan perikanan yang diprioritaskan sebagai strategi dalam memanfaatkan peluang di era penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sehingga menjadi salah satu prioritas pembangunan penting dan issue strategis pembangunan nasional.

Sektor Kelautan dan Perikanan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan sektor lain, khususnya sumberdaya perikanan laut yang pada hakekatnya tidak dapat dibatasi berdasarkan wilayah administrasi dan bersifat terbuka dalam pemanfaatannya. Sumberdaya perikanan laut tropis memiliki banyak spesies yang relatif terbatas jumlahnya.

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kedepan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan IPTEK, sumberdaya manusia yang berkualitas, kerja sama antar instansi/lembaga pemerintah lainnya, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Secara substansi, Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat mengacu pada RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah Pusat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Barat, RPJMD Provinsi Sumatera Barat antara lain, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, peningkatan nilai tambah, dan daya saing produk serta ramah lingkungan yang merupakan Program Strategi dan Prioritas Pemda Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan

pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hierarkinya rencana pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat dalam dokumen RKPD yang memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selamat setahun yang diperoleh dari Rencana Kerja (Renja) OPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan penyusunan rencana dan program kerja merupakan hal yang sangat penting mengingat sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan itu sendiri agar bersinergi dan sinkron dalam penyusunan program dan kegiatan. Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan : Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju kuat dan berbasiskan kepentingan Nasional.

Untuk itu perlu pelaksanaan konsep blue economy dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan dan

pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumberdaya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan blue economy tersebut diharapkan dapat menciptakan daya saing yang lebih tinggi melalui inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan, serta menciptakan lapangan kerja. Upaya pengembangan blue economy perlu pula diiringi upaya untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta upaya untuk mengelola wilayah laut nasional secara terintegrasi.

Terwujudnya *good governance* dalam praktek-praktek pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Secara substansi, rencana Program dan Kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat mengacu pada RPJM, Rencana Kerja pemerintah pusat, Rencana Kerja daerah Sumatera Barat antara lain, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, peningkatan nilai tambah, meningkatkan daya saing produk serta ramah lingkungan. Disamping itu juga untuk mengembangkan kelembagaan petani/nelayan, masyarakat pesisir dan pemerintah serta dunia usaha dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan pemanfaatan sumberdaya perikanan, pemasaran hasil perikanan.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melihat beberapa aspek sebagai bahan pertimbangan dan pedoman. Capaian Kinerja RPJMD 2021-2026, Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, hasil evaluasi kinerja tahun 2022.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keterkaitan ini dimaksudkan agar adanya sinergisitas dan sinkronisasi dalam penyusunan Program dan kegiatan serta kebijakan yang akan dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 merupakan acuan yang penting dalam Proses penyusunan Rencana Kerja SKPD, hal ini tentunya untuk melihat sejauh mana target kinerja yang menjadi indikator keberhasilan suatu SKPD dapat dicapai.

Rencana Kerja dan pendanaan serta prakiraan maju disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yaitu kebijakan, program pemerintah daerah yang didanai APBD yang dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Oleh karena itu secara kontekstual dan substantif dalam mekanisme perencanaan pemerintah daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan program-program pemerintah pusat, program-program Kabupaten/Kota, untuk memenuhi ketentuan tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan kelengkapan dokumen perencanaan dan penganggaran bagi penyusunan RAPBN/RAPBD tahun 2024.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja OPD ini dituangkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
5. Undang-undang No.45 Tahun 2013 Tentang Perikanan
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022.
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra OPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD dan Renstra OPD, Pokok-pokok isi dokumen Renstra OPD, Status hukum Renstra OPD. Renstra OPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja OPD.
13. Permendagri nomor 86 Tahun 2017 perubahan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
18. Peraturan Gubernur Nomor : 3 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 109 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 3 Tahun 2020 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud utama penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2025 adalah agar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan tujuan utama penyusunan Rencana Kerja OPD adalah :

- a. Untuk menjabarkan rencana pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan serta Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2022-2023. Dengan demikian keterkaitan antara Rencana Anggaran dan Penyusunan Anggaran dapat terjaga sehingga terwujudnya Anggaran berbasis Kinerja dalam suatu SKPD sesuai yang diamanatkan dalam Undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah (RPJMD tahun 2021-2026)
- c. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan
- d. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil kegiatan.

#### **1.4 . Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **I. PENDAHULUAN**

Memuat Latar belakang , Landasan hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

##### **II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD, Analisa kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN**

Memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan.

##### **IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Rencana Kerja OPD beserta anggaran sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

##### **V. PENUTUP**

## II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1. *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra*

#### *Perangkat Daerah*

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pelaksanaan dan capaian Renstra hingga Tahun 2023, sebagaimana terdapat pada table T-C.29, Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan s/d Tahun 2023.

Dalam mendukung pelaksanaan capaian target sasaran strategis tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi dana APBD 2023 sebesar Rp.89.837.588.451,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.85.498.276.782,- (95,17%) dan realisasi fisik sebesar 99,91%. Serta alokasi dana APBN tahun 2023 sebesar Rp.1.934.168.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.897.352.430,- (98,09 %) dengan realisasi fisik 100%. Yang terdiri dari :

#### **APBD**

Untuk program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Tahun 2023 terdiri dari 2 jenis belanja yaitu Belanja Langsung Pokok yang terdiri dari 1 program, 8 kegiatan, 26 sub kegiatan dan Belanja Langsung Urusan yang terdiri dari 5 program, 13 kegiatan, 27 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. APBD sebesar Rp. 89.837.588.451,- yang terdiri dari :
  - Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 18.315.087.412,-
  - Belanja Langsung terdiri dari :
    - Belanja Langsung Pokok sebesar Rp. 10.122.746.232,-
    - Belanja Langsung Urusan sebesar Rp. 61.399.754.807,-dengan jumlah total sebesar Rp. 71.522.501.039,-
- b. DAK sebesar Rp. 11.453.518.000,- (yang sudah ditumpangkan melalui belanja langsung urusan APBD).

**2.1.1 Belanja Langsung Pokok**

Jumlah anggaran belanja langsung pokok yang dibiayai sebesar Rp. 28.437.833.644,- dengan realisasi Rp. 27.592.548.837,- atau 97,03 % yang terdiri dari 1 program, 8 kegiatan seperti tabel 2.1.1 berikut :

**Tabel. 2.1.1 Program Belanja Langsung Pokok APBD Tahun 2023**

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	466.601.342
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.046.786.612
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.663.500
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.914.981.540
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.714.488.992
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	664.196.500
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	255.072.500
8.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	440.833.135
	<b>TOTAL</b>	<b>28.437.833.644</b>

**2.1.2 Belanja Langsung Urusan**

Belanja langsung urusan merupakan belanja kegiatan urusan yang bersifat teknis urusan perikanan. Program - program yang ada pada jenis belanja ini adalah program - program yang mendukung kegiatan bidang - bidang yang bertujuan untuk mencapai Sasaran Kinerja Dinas. Jumlah anggaran belanja langsung urusan

yang dibiayai sebesar Rp. 61.399.754.807,- yang terdiri dari 5 program seperti tabel berikut :

**Tabel 2.1.2. Program Belanja Langsung Urusan Tahun 2023**

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)
I	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	8.663.526.401,-
II	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	29.820.494.643,-
III	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	11.992.215.032,-
IV	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	5.719.844.957,-
V	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	5.203.673.774,-
<b>Total Dana Belanja Langsung Urusan</b>		<b>61.339.754.807,-</b>

**Tabel 2.1.3. Rerkapitulasi Realisasi APBD Tahun 2023**

No.	Urusan	Jumlah	Realisasi	Persentase Keuangan
I	Belanja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	28.437.833.644	27.592.548.837	97,03
II	<b>Belanja Langsung :</b>			
1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	8.663.526.401	7.733.534.924	89,27
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	29.820.494.643	27.993.438.978	93,87
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	11.992.215.032	11.640.707.917	97,07
4	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	5.719.844.957	5.379.620.415	94,05
5	Program Pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan	5.203.673.774	5.158.425.711	99,13
<b>JUMLAH I + II</b>		<b>89.837.588.451</b>	<b>85.498.276.782</b>	<b>95,17</b>

**APBN**

Anggaran Pembangunan yang berasal dari APBN sebesar Rp. 1.934.168.000,- realisasi sebesar Rp. 1.897.352.430,- (97,81%), Fisik 100 % sumber dana berasal dari Rupiah Murni yang terdiri dari 7 Satker berada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat seperti tabel 2.1.4 berikut :

**Tabel. 2.1.4. Rekapitulasi Anggaran APBN Tahun 2023**

SATKER	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)	SISA
		Rp	%		
01					
SEKRETARIAT JENDERAL					
DK (080007)	220.000.000	209.629.369	95,12	100	10.370.631
03					
DITJEN PERIKANAN TANGKAP					
DK (089000)	440.600.000	423.108.180	96,03	100	17.491.820
04					
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA					
DK (089003)	536.682.000	534.374.267	99,57	100	2.307.733
05					
DITJEN PERIKANAN PENGAWASAN SDAYA KP					
DK (089005)	180.477.000	177.979.424	98,62	100	2.497.576
06					
DITJEN PDSKP					
DK (089005)	323.517.000	322.529.954	99,69	100	987.046
07					
DITJEN PRL PSDKP					
DK (089006)	232.500.000	229.731.236	98,81	100	2.768.764
<b>TOTAL</b>	<b>1.934.168.000</b>	<b>1.897.352.430</b>	<b>98,09</b>	<b>100</b>	<b>36.815.570</b>

**Faktor – Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Program/Kegiatan****1. Faktor Internal**

Untuk pencapaian realisasi tidak ada permasalahan faktor internal sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan secara keseluruhan dan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

## **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja hasil antara lain

- Adanya pengalihan kewenangan budidaya air tawar ke kab/kota sehingga berdampak terhadap pencapaian produksi perikanan budidaya.
- Untuk kegiatan budidaya udang vaname adanya perpindahan lahan yang termasuk ke dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sehingga tidak bisa dilakukan untuk usaha perikanan dan juga pengaruh cuaca ekstrim
- Untuk kegiatan pembangunan pabrik es Sasak dikarenakan kesulitan mendapatkan tenaga kerja lokal karena pada umumnya masyarakat Sasak berkebun dan nelayan sehingga harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah dan juga pengaruh curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan terkendalanya pelaksanaan di lapangan.

## RENCANA KERJA (RENJA) | TAHUN 2025

**TABEL T-C.29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT s/d TAHUN 2025**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja, Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelauran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja tahun 2024 ( n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%) Realisasi Target Renstra (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

		<i>daerah provinsi</i>								
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</i>	9 Dokumen	9 Dokumen	85%	85%	100%	85%	85%	100%
3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Dokumen evaluasi kinerja triwulan, monev kegiatan</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	198 Org
<b>3.25.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b><i>Persentase tertib administrasi keuangan</i></b>	<b>100%</b>							
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Gaji dan tunjangan ASN</i>	198 Org	198 Org	198 Org	198 Org	100%	198 Org	198 Org	100%
3.25.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Tertib administrasi keuangan</i>	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

3.25.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Laporan keuangan akhir tahun</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran</i>	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	150 Org	12 Bln	12 Bln	100%
<b>3.25.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b><i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i></b>	<b>100%</b>							
3.25.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah pegawai</i>	150 Org	150 Org	150 Org	150 Org	100%	150 Org	150 Org	100%
3.25.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah pegawai yang mengikuti Bintek peraturan perundang-undangan</i>	30 Org	30 Org	15 Org	15 Org	100%	15 Org	15 Org	100%
3.25.01.1.05.11	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	<i>Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi</i>	160 Org	160 Org	160 Org	160 Org	100%	160 Org	160 Org	100%

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor</i>	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor</i>	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.25.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah sarana kendaraan dinas operasional</i>	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
3.25.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor</i>	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
3.25.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor</i>	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%

## **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
3.25.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	12 Bln	12 Bln	100%
3.25.01	<b>PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>									

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	<i>Persentase efektifitas pengelolaan Kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil</i>									
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi										
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	<i>Terlaksananya pengawasan pulau-pulau kecil bagi pelaku usaha</i>	7 Kawasan	7 Kawasan	7 Kawasan	7 Kawasan	100%	7 Kawasan	7 Kawasan	100%	
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<i>Terlaksananya wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi</i>	7 Kawasan	7 Kawasan	7 Kawasan	7 Kawasan	100%	7 Kawasan	7 Kawasan	100%	
3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	<i>Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil</i>	3.000 Btg	3.000 Btg	4.000 Btg	4.000 Btg	100%	1.230 Btg	1.230 Btg	100%	

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<i>Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat kapasitasnya</i>	7 Kawasan	7 Kawasan	7 Kawasan	7 Kawasan	100%	7 Kawasan	7 Kawasan	100%
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<i>Terlaksananya pembinaan kelompok usaha bersama</i>	7 Kawasan	7 Kawasan	7 Kawasan	7 Kawasan	100%	7 Kawasan	7 Kawasan	100%
3.25.02.1.03.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	<i>Kelompok masyarakat yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan</i>	7 Kawasan	7 Kawasan	7 Kawasan	7 Kawasan	100%	7 Kawasan	7 Kawasan	100%
3.25.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<i>Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap</i>								

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil									
3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	<i>Tersedianya data dan informasi sumberdaya ikan</i>	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%
3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	<i>Jumlah sarana perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 Mil</i>						1664 Unit	1664 Unit	100%
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
3.25.03.1.02.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	<i>Jumlah sarana perikanan tangkap ygtersedia di wilayah perairan darat</i>						144 Unit	144 Unit	100%

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT										
3.25.03.1.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	<i>Jumlah persyaratan dan prosedur penertiban rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap</i>							150 Org	150 Org	100%
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	<i>Jumlah rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkpa yang diterbitkan</i>	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	100%	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	100%	
3.25.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<i>Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya</i>									

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
3.25.04.1.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	<i>Jumlah rekomendasi persyaratan dan prosedur penertiban izin usaha perikanan budidaya</i>	60 Org	60 Org	60 Org	60 Org	100%	60 Org	60 Org	100%	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut										
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	<i>Jumlah sarana pembudidayaan ikan di laut</i>	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100%	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100%	
3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh	<i>Terlaksananaya pelatihan pembudidaya ikan</i>	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%	

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

	Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sarana pembudidayaan ikan di laut</i>	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%
3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan</i>	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai									

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

	dengan 12 Mil									
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	<i>Tersusunnya dokumen RZP</i>	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	100%	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	100%
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	<i>Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap</i>	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	100%	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	100%
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	<i>Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang terdaftar dan aktif</i>	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	100%	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	100%
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

3.25.05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	<i>Terlaksananya pelatihan pembudidaya</i>	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%
3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<i>Persentase produksi olahan hasil perikanan</i>								
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya kegiatan peningkatan permodalan pelaku usaha</i>	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%
3.25.06.1.02	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>									
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	<i>Terlaksananya diversifikasi pengolahan</i>						10 Kali	10 Kali	100%
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau	<i>Terlaksananya peningkatan kapasitas KKMB pendamping usaha kelautan dan perikanan</i>	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

	digunakan, dan Berdaya Saing									
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
3.25.06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya sarana pemasaran</i>	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%

**2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan telah menargetkan beberapa Indikator yang menjadi Target Kinerja setiap tahunnya. Hal ini dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan.

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan 7 (tujuh) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2.1 berikut :

**TABEL. 2.2.1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,07	5,83	544,86
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3.39	2,052	60.53
3	Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	156.85	291	185,53
4	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	- Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	7,26	7,5	103.30
5	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	- Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan-Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	52,94	59,75	112,86
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,12)	A 80.22	100,09
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	B (82,00)	86,65	105,03
<b>Rata-rata capaian sasaran strategis</b>					<b>173,17</b>

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan 7 (tujuh) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dari 7 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja

dengan rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 173,17 % hal ini termasuk keberhasilan *Sangat Tinggi*. Dari 7 indikator kinerja, 6 indikator kerja capaiannya diatas 100% (Sangat Tinggi) dan 1 indikator kinerja capaiannya di bawah 100% yaitu indikator sasaran 2 dengan capaian Rendah. Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dari pencapaian 7 indikator kinerja. Produksi

Indikator kinerja tertinggi adalah persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dengan capaian 544,86% terdapat pada sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap, kemudian diikuti oleh indikator nilai ekspor hasil perikanan dengan capaian 185,53% terdapat pada sasaran meningkatnya hasil pemasaran perikanan, kedua indikator tersebut dengan kategori Sangat Tinggi.

Dukungan pencapaian sasaran ini adalah dengan adanya program-program pemerintah yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, baik dari dana APBD, APBN maupun dana-dana lainnya :

✚ Indikator Kinerja Pendapatan didukung oleh Program/kegiatan :

Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung	Alokasi	Realisasi	(%)
-------------------	--	---------	-----------	-----

## RENCANA KERJA (RENJA) | TAHUN 2025

• Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>29.820.494.643</b>	<b>27.993.438.978</b>	<b>93,87</b>
	<b>I. Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>	<b>25.582.421.774</b>	<b>23.820.162.946</b>	<b>93,11</b>
• Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Sub Kegiatan :			
	1. Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	29.648.250	27.185.603	91,69
	2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	18.915.016.552	18.722.737.612	98,98
	<b>II. Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>1.456.501.920</b>	<b>1.437.183.255</b>	<b>98,67</b>
	Sub Kegiatan :			
	1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.456.501.920	1.437.183.255	98,67
	<b>III. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	<b>300.776.750</b>	<b>270.043.910</b>	<b>89,78</b>
	Sub Kegiatan :			
	1. Penetapan persyaratan dan prosedur izin berukuran diatas 10 GT sampai dengan usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan 30 GT.	59.252.000	58.997.000	99,57
	2. Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap utk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dgn 30 GT	241.524.750	211.046.910	87,38

<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>11.952.489.432</b>	<b>11.640.707.917</b>	<b>97,07</b>
<b>I. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahan Lintas Daerah Kabupaten/Kota alm 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>41.725.600</b>	<b>41.222.400</b>	<b>98,79</b>
Sub Kegiatan :			
1. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	41.725.600	41.222.400	98,79
<b>II. Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>11.950.489.432</b>	<b>11.599.485.517</b>	<b>97,06</b>
Sub Kegiatan :			
1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.144.332.400	1.143.353.225	99,91
2. Penyediaan Sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota	7.796.963.629	7.470.838.725	95,82
3. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut dan lintas daerah Kabupaten/Kota	227.208.853	227.081.400	99,94
4. Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di laut dan dikawasan konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	171.267.700	170.207.100	99,38
5. Penyediaan prasarana pembudidayaan Ikan di Laut	488.248.600	482.316.600	98,79

Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th) dihitung berdasarkan jumlah

produksi hasil tangkapan nelayan pada tahun yang bersangkutan yang dikalikan dengan harga jual perjenis ikan sehingga didapatkan nilai produksi. Nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi sehingga diperoleh penerimaan, penerimaan ini dibagi antara pemilik dengan nelayan. Persentase pembagian antara pemilik kapal dengan nelayan ini berkisar 60% pemilik : 40% nelayan. Hal ini terjadi pada alat tangkap dengan kapal berukuran > 5GT seperti Bagan, Purse Seine, Tonda, Payang yang umumnya nelayan adalah sebagai anak buah kapal. Namun untuk perahu motor berukuran < 5GT umumnya nelayan adalah pemilik yang langsung turun ke laut menangkap ikan.

Capaian indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan dampak dari produksi perikanan laut, perairan umum dan peningkatan kapasitas kapal penangkapan ikan. Dengan produksi perairan laut sebesar 222.940,89 ton dan perairan umum sebesar 8.502,31 ton dengan total jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 231.443,20 ton pada tahun 2023 dan jumlah nelayan tahun 2023 sebanyak 45.249 orang. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan nelayan ini dikarenakan harga jual ikan pada umumnya mengalami kenaikan disbanding pada tahun sebelumnya.

Data pendapatan nelayan dan produksi nelayan tahun 2023 masih berupa angka sementara yang akan secara bertahap akan divalidasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Dinas yang membidangi sektor perikanan Kab/Kota.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan diperairan umum yaitu dengan cara penebaran benih ikan di perairan umum (danau dan sungai). Hal ini telah memberi dampak terhadap peningkatan produksi ikan di perairan umum sehingga pendapatan nelayan di perairan umum juga meningkat. Selanjutnya adalah memberikan bantuan sarana penangkapan (mesin, jaring dan fish box) yang diberikan oleh pemerintah ikut memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan nelayan.

Perbaikan pendapatan nelayan Provinsi Sumatera Barat terus diupayakan melalui usaha perbaikan dan penyempurnaan sarana/prasarana maupun

pembinaan dan penyuluhan yang berkelanjutan melalui memperkenalkan serta menerapkan teknologi yang dianjurkan, maupun memperbaiki mata rantai pemasaran ikan melalui informasi harga pasar ikan.

Sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat adalah mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan beserta keluarganya. Salah satu tolok ukur yang dipakai adalah dengan melihat tingkat pendapatan penghasilan yang diterima oleh keluarga nelayan khususnya dari usaha perikanan. Berdasarkan hal diatas program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat diarahkan kepada sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan/pembudidaya ikan ke taraf hidup yang layak.

Pengukuran capaian indikator kinerja pendapatan nelayan diperoleh dari besarnya pendapatan yang diterima oleh nelayan pemilik dan nelayan buruh dipengaruhi oleh sistem bagi hasil yang berlaku, jenis alat tangkap yang dipergunakan dalam operasi penangkapan dan jumlah nelayan yang terlibat dalam usaha penangkapan, dimana sistem bagi hasil yang berlaku sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Di laut, perairan umum dan peningkatan kapasitas kapal penangkapan ikan. Kegiatan ini didukung melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan baik yang berasal dari APBD dan APBN.

Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk pengembangan perikanan budidaya, baik perikanan air tawar, payau maupun laut. Hal ini didukung oleh adanya empat danau yang menyebar di Kab/Kota diantaranya Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Diatas dan Danau di bawah ditambah dengan kolam, waduk, embung dan sungai. Selain itu potensi budidaya payau dan laut yang terbentang dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan.

Tekhnologi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya ikan telah berkembang dari waktu ke waktu. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan baik melalui APBD maupun APBN untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam

rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dari garis kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang mandiri di sektor ekonomi.

Indikator Kinerja Kapal Nelayan yang tidak melakukan Illegal fishing :

Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung	Alokasi	Realisasi	(%)
-------------------	--	---------	-----------	-----

Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	<b>Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</b>	8.663.526.401	7.733.534.924	89,27
	<b>I. Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>7.451.574.677</b>	<b>26.562.251.624</b>	<b>88,07</b>
	Sub Kegiatan :			
	1. Pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat	63.674.000	47.288.000	100,00
	2. Rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil	442.558.000	428.873.000	96,91
	3. Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	288.433.500	287.810.750	99,78
	<b>II. Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</b>	<b>1.211.951.724</b>	<b>1.171.283.300</b>	<b>96,64</b>
	Sub Kegiatan :			
	1. Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	1.001.285.024	977.407.650	97,62
	2. Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	107.418.000	102.555.650	95,47
3. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	103.248.700	91.320.000	88,45	

<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>5.719.844.957</b>	<b>5.379.620.415</b>	<b>94,05</b>
<b>I. Kegiatan : Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>5.563.584.707</b>	<b>5.227.064.611</b>	<b>93,95</b>
Sub Kegiatan :			
1. Pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 Mil	63.284.000	56.398.350	89,12
2. Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil	4.607.761.606	4.368.820.250	94,81
3. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	372.780.100	331.868.760	89,03
<b>II. Kegiatan : Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>156.260.250</b>	<b>152.555.804</b>	<b>97,63</b>
Sub Kegiatan :			
1. Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	156.260.250	152.555.804	97,63

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing yaitu sebesar 105,43 % hal ini adalah karena

upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yaitu

- a. Melakukan operasi pengawasan laut dan perairan umum daratan secara rutin dan berkelanjutan.
- b. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat pelaku usaha baik itu masyarakat nelayan, pengolah atau pedagang ikan, pembudidaya ikan terkait peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- c. Meningkatkan SDM personil pengawas perikanan/PPNS yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat pelaku usaha perikanan terhadap pentingnya mentaati aturan yang berlaku terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan konkrit dilapangan adalah dengan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil . Dimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah melalui kegiatan APBD seperti : Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan melakukan operasional pengawasan dilaut dan perairan umum secara terpadu dengan Instansi terkait. Dengan adanya operasional ini maka berkurangnya kegiatan penangkapan yang menggunakan bahan dan alat yang dilarang sehingga persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%) sebanyak 90,95 %.

Selama Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan kapal perikanan oleh Kapal Pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terhadap pelanggaran tindak pidana perikanan di Perairan Sumatera Barat dan Pantai Barat Sumatera Barat, dimana jumlah kapal yang diperiksa sebanyak 476 kapal baik yang diperiksa di perairan laut maupun di perairan umum. Pelanggaran yang dilihat adalah tidak memiliki dokumen atau terdaftar (didominasi oleh kapal-kapal izin daerah), pelanggaran terhadap ketidaksesuaian izin dan daerah penangkapan, serta pelanggaran administrasi dimana yang dilihat adalah kelengkapan surat-surat yang diperlukan.

Terhadap kapal-kapal yang belum laik operasi (belum memiliki dokumen lengkap) diberikan rekomendasi tindakan perbaikan (Corrective Action) untuk melengkapi kekurangan dokumen. Pengawasan dilakukan di wilayah perairan Sumatera Barat bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. Pengawasan ini dilakukan di wilayah perairan laut Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan menggunakan KP Tenggiri, KP Todak, KP Cinta Laut dengan mengawasi wilayah laut 7 Kab/Kota wilayah pesisir. Dari 542 kapal yang diperiksa diperoleh 493 kapal yang mempunyai dokumen lengkap dan yang melakukan pelanggaran administrasi yaitu dokumen yang dimiliki tidak lengkap sebanyak 49 kapal. Dengan demikian persentase nelayan yang tidak melakukan illegal fishing yaitu kapal yang mempunyai dokumen lengkap sebanyak 493 kapal dibagi dengan jumlah kapal yang diperiksa secara keseluruhan sebanyak 542 kapal maka diperoleh hasilnya sebanyak 90,95 %.

Kegiatan pengawasan di atas dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha perikanan baik nelayan maupun pengusaha perikanan akan pentingnya pengurusan dokumen-dokumen kapal dalam melakukan operasional penangkapan ikan dan pentingnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Wilayah pesisir pantai Sumatera Barat merupakan wilayah yang sangat rawan dengan bencana baik gempa bumi, tsunami, maupun akibat degradasi pantai yang kerap terjadi karena ulah manusia sendiri, maka peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sangat diperlukan.

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran ini maka dampak yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin penangkapan sehingga makin tertibnya administrasi nelayan dalam menangkap ikan sehingga Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat tetap terjaga dari kegiatan-kegiatan yang merusak, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu juga dirasakan adanya peningkatan kesadaran kelompok masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

# RENCANA KERJA (RENJA) | TAHUN 2025

✚ Indikator Kinerja Ekspor dan Konsumsi Ikan :

Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung	Alokasi	Realisasi	(%) capaian
1	2	3	4	5

1. Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	<b><u>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</u></b>	5.203.673.774	5.158.425.711	99,13
2. Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	I. Kegiatan : <b>Penertiban Izin Usaha Pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	994.451.800	988.452.180	99,40
	Sub Kegiatan :			
	1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	994.451.800	988.452.180	99,40
	II. Kegiatan <b>Pembinaan Mutu &amp; Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan &amp; Pemasaran Skala Menengah &amp; Besar</b>	1.621.702.260	1.613.931.614	99,52
	Sub Kegiatan :			
	1. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	323.815.000	323.132.094	99,79
	2. Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam	641.493.560	638.683.724	99,56
	rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan			

Tingkat konsumsi ikan per kapita mengalami peningkatan setiap tahun dari 2021 s/d 2026 bahwa tingkat konsumsi ikan perkapita meningkat dari target yang ditentukan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program-program peningkatan konsumsi ikan yang dilaksanakan berhasil meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Untuk mendukung peningkatan konsumsi ikan, telah diinisiasi berbagai program/kegiatan pembangunan yang dititik beratkan pada 3 (tiga) aspek utama yaitu : menjamin dan mendukung penguatan ketersediaan (supply) hasil perikanan, mendukung kemudahan masyarakat dalam menjangkau (accessibility) hasil perikanan, serta mendorong peningkatan (consumption) hasil perikanan.

Program dan kegiatan pemasaran ikan segar untuk konsumsi dalam negeri maupun kebutuhan ekspor diarahkan guna menunjang kelangsungan upaya tingkat perbaikan, tingkat penghasilan nelayan/pembudidaya ikan serta pengolah hasil perikanan disamping untuk menyediakan makanan yang lebih sehat untuk dikonsumsi dan menarik selera bagi konsumen serta mampu secara optimal meningkatkan kesejahteraan para pelaku terutama dalam memberikan nilai tambah (added value).

Faktor utama pada pemasaran ikan segar adalah informasi yang tepat dan cepat antara daerah produsen dan pusat konsumen, karena harga ikan di beberapa daerah tertentu/produsen dari waktu ke waktu sangat bervariasi. Sering terjadi ikan menumpuk disuatu daerah dengan harga yang sangat rendah padahal di daerah lain dengan waktu yang relatif sama kekurangan ikan, sehingga harga ikan sangat mahal.

Dalam rangka mempertahankan mutu ikan supaya tetap dapat dimakan (dalam keadaan sehat bagi konsumen) dan lebih menarik selera konsumen baik dari segi rasa maupun dari sisi penyajiannya, diperlukan penyiapan sarana pengolahan serta penyempurnaan sistem dan mekanisme pemasarannya, sehingga setiap produk berupa ikan yang telah dihasilkan dapat sampai ketangan konsumen dalam keadaan baik dan sehat untuk dikonsumsi.

Upaya pengolahan dan pengawetan produk perikanan mutlak diperlukan guna menjaga agar produk yang dihasilkan pembudidaya ikan/nelayan dapat sampai ditangan konsumen dalam keadaan baik dan layak dimakan (consumable). Hal ini mengingat bahwa ikan adalah komoditi pangan yang sangat mudah membusuk (Highly Perishable).

Ikan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh, kecerdasan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Mutu protein ikan cukup tinggi karena mengandung asam amino yang lengkap sehingga termasuk protein komplit. Disamping itu ikan memiliki lemak dengan keunggulan khusus yaitu mengandung asam lemak omega-3 yang dapat menurunkan kolesterol dalam darah, mencegah terjadinya agregasi keping darah merah serta dapat mengurangi resiko penyakit jantung, selain protein ikan dilengkapi dengan mineral dan vitamin yang sangat dibutuhkan bagi tubuh yang 2.651,78 berperan agar tubuh tetap sehat dan dapat menangkal serangan penyakit.

Pencapaian target indikator sasaran ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya kegiatan penyebarluasan gerakan makan ikan, forum peningkatan konsumsi ikan (Forikan), gelar tekhnologi pecan nasional tani dimana dari kegiatan tersebut memiliki kinerja yang baik.

Indikator kinerja tingkat konsumsi ikan yang targetnya 43,08 kg/kapita/th. Dengan adanya kegiatan penyebarluasan gerakan makan ikan di Provinsi merangsang Kab/Kota untuk melaksanakan kegiatan yang sama ditingkat Kab/Kota, sehingga meningkatkan produk-produk olahan bernilai tambah dan bervariasi seperti rendang lele, nugget ikan, criso, belut dan lain-lain yang tentunya meningkatkan konsumsi ikan masyarakat yang merupakan salah satu target kinerja serta dilaksanakan kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) dan juga upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat antara lain : mempromosikan hasil-hasil produk olahan hasil perikanan Sumatera Barat kepada masyarakat, memberikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan kepada masyarakat antara lain : Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI), sarana olahan,

vacum sealer, fish box serta SPG Roda 3, memperkenalkan keanekaragaman produk perikanan dari Sumatera Barat, meningkatkan daya saing produk perikanan kepada masyarakat luas dan melakukan koordinasi dengan Kab/Kota dan meningkatkan kemampuan SDM masyarakat pengolah.

## ✚ Indikator Kinerja Organisasi

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (80,12)	A (80,22)	100,09

Akuntabilitas kinerja menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Dengan akuntabilitas kinerja membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan sasaran pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat, menetapkan ukuran keberhasilan atas pencapaian sasaran pembangunan dan memilih program dan kegiatan yang paling efektif dan efisien. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.

Target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 Nilai A (80,15%) berdasarkan hasil penilaian Dinas Kelautan dan Perikanan dengan realisasi sebesar 80,22 % dengan capaian 100,09 % (Memuaskan). Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja
2. Menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Indonesia bahwa setiap perangkat daerah harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kerjanya yang sesuai dengan cascading
3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja, menyusun rencana aksi

Hakekat pemberian otonomi kepada daerah adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatnya kualitas pelayanan OPD akan menciptakan pemerintahan yang mampu bersaing sehingga dilingkungan pemerintahan tercipta kompetitif (competitive government).

Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan hingga saat ini masih belum optimal terhadap masyarakat Nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan. Belum optimalnya pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan masyarakat pesisir di Sumatera Barat, masih rendahnya mutu ikan yang sesuai dengan standar dan masih banyaknya kapal – kapal nelayan yang masih belum dilengkapi dengan SIUP dan SIPI dan faktor – faktor lainnya yang saling mempengaruhi. Hal ini tentunya diperlukan peningkatan pelayanan kemasyarakat dengan pendekatan – pendekatan yang bersifat implikatif melalui program dan kegiatan yang prorakyat dan peningkatan produksi.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan dengan menyusun program – program strategis seperti : Penetapan Lokasi Sentra produksi budidaya perikanan air tawar, payau dan laut yang tersebar Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi juga secara intensif terus melakukan pembinaan kepada nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan guna peningkatan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagai sasaran akhir program.

**Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan OPD antara lain :**

1. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta penguasaan teknologi perikanan budidaya
3. Masih terbatasnya prasarana dan sarana pelabuhan perikanan
4. Masih belum terpenuhinya kebutuhan benih untuk usaha budidaya laut dan

payau

5. Masih rendahnya kemampuan manajerial usaha dan kualitas kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan
6. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan
7. Masih adanya kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan baik dilaut maupun perairan umum
8. Pemanfaatan ruang oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut, maka solusi dan upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditas unggulan sektor perikanan, dengan arah kebijakan antara lain :
  - a. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian bibit dan benih bersertifikat
2. Mengembangkan usaha-usaha ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan antara lain :
  - a. Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan melalui 1000 rumpon dan sarana lainnya serta pengawasan perikanan
  - b. Pengembangan budidaya laut, payau dan komoditas perikanan lainnya.
3. Pengembangan system value chain, dengan arah kebijakan antara lain :
  - a. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas perikanan
  - b. Pengembangan jaringan pemasaran produk perikanan
  - c. Pengintegrasian program perikanan dan lingkungan hidup
4. Fasilitasi pembangunan industri hilir perikanan, dengan arah kebijakan antara lain:
  - a. Memfasilitasi pembangunan pemrosesan hasil perikanan

# RENCANA KERJA (RENJA) | TAHUN 2025

**TABEL T-C.30  
PENCAPAIAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN S/D TAHUN 2025**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat</b>												
1	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap			0,99	1,07	1,09	1,11	2,9	5,83	1,09	1,11	Capaian Realisasi sangat Baik
2	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya			3,33	3,39	3,71	3,78	3,36	2,052	3,71	3,78	Capaian Realisasi sangat Baik
3	Persentase produksi olahan hasil perikanan			6,49	7,26	7,95	8,05	10,03	7,5	7,95	8,05	Capaian Realisasi sangat Baik
4	Nilai ekspor hasil perikanan			155,50	156,85	158,42	60	272,35	291	158,42	60	Capaian Realisasi sangat Baik
5	Persentase efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pualu kecil (%)			47,06	52,94	58,82	74,71	49,26	59,75	58,82	74,71	Capaian Realisasi sangat Baik
6	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku			82	84	86	90	82	84	86	90	Capaian Realisasi sangat Baik

**2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap terutama pada pelabuhan perikanan
2. Pengolahan hasil perikanan yang telah ada masih perlu ditingkatkan menjadi berbagai bentuk produk olahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.
3. Sejumlah isu lingkungan juga dihadapi oleh sektor kelautan dan perikanan diantaranya : Antisipasi terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu, pencegahan terhadap kerusakan kawasan pesisir dan laut, pencemaran perairan umum seperti pada Danau Maninjau, perkembangan usaha tambak udang vaname yang cukup cepat tanpa memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah dan sepadan pantai.
4. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan produktifitas perikanan budidaya karena masih terbatasnya sarana usaha yang dimiliki nelayan dan pembudidaya ikan begitu juga dengan penguasaan tekhnologinya, sehingga yang menjadi permasalahan bukan produksinya akan tetapi keterbatasan sarana usaha dan tekhnologinya.

**a. Program Kegiatan Tahun Anggaran 2024**

Tahun Anggaran 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. **63.357.032.075,-** yang terdiri dari 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 5 Program Urusan dengan 20 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Urusan	APBD 2024
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	27.917.872.145

II.	Program Pengelolaan Kelautan, pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4.624.799.983
III.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	17.873.705.000
IV.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.352.901.000
V.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	3.155.000000
VI.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.432.753.950
<b>TOTAL</b>		<b>63.357.032.075</b>

**b. Kemajuan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024**

Kemajuan realisasi Program Kegiatan Tahun Anggaran 2024, untuk kegiatan Dana APBD dan APBN sampai dengan Januari 2024 secara fisik maupun realisasi keuangan masih belum ada.

**c. Implikasi Target Capaian Program Renstra OPD**

Program dan Kegiatan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 seperti terlihat pada lampiran Renja ini dengan rincian sebagai berikut :

Tujuan dari program masing-masing kegiatan secara umum antara lain :

- Peningkatan produksi perikanan budidaya
- Peningkatan produksi perikanan tangkap
- Pengendalian sumberdaya ikan
- Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan
- Peningkatan SDM nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan
- Pengelolaan sumberdaya alam kelautan dan perikanan
- Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
- Peningkatan PAD melalui sektor Kelautan dan Perikanan

**d. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran dalam mengatasi faktor penyebab ketidaktercapainya keberhasilan target kinerja hasil.**

Kebijakan serta tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang dapat diambil dalam pencapaian target kinerja antara lain :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana penangkapan ikan
- b. Mengoptimalkan potensi budidaya yang belum tergarap serta membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal usaha dan kepastian berusaha.
- c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- d. Meningkatkan penataan dan pengelolaan lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan secara komprehensif dengan melibatkan peran serta masyarakat, pemangku setempat serta Perguruan Tinggi.
- e. Mengembangkan industri pengolahan, perbaikan mutu hasil perikanan dan memperkuat jejaring serta daya tembus pemasaran produk Hasil Kelautan dan perikanan dalam dan luar negeri
- f. Peningkatan Sumberdaya manusia Kelautan dan Perikanan , Sasarannya adalah agar meningkatnya kuantitas maupun kualitas sumberdaya manusia; mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, penyuluh dan aparat pengelola kelautan dan perikanan. Sehingga pada tahun 2016 industri perikanan dapat jadi motor penggerak (prime mover) ekonomi masyarakat, wilayah maupun nasional.

# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

### T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025			Hasil Analisa Kebutuhan			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
<b>TOTAL PAGU</b>				<b>101.392.211.000</b>				<b>101.392.211.000</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>32.443.412.684</b>				<b>32.443.412.684</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Senkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</b>			<b>500,000,000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>500,000,000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan	Prov Sumbar	5 Dok	200,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov Sumbar	5 Dok	200,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	Prov Sumbar	1 Lap	300,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov Sumbar	1 Lap	300,000,000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi keuangan</b>			<b>21,061,273,246</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>21,061,273,246</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Prov Sumbar	198 orang	20,011,273,246	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov Sumbar	198 orang	20,011,273,246
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas pegawai	Prov Sumbar	42 org	900,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov Sumbar	42 org	900,000,000

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	Prov Sumbar	2 Dok	150,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov Sumbar	2 Dok	150,000,000
<b>Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</b>			<b>555,000,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah</b>			<b>555,000,000</b>
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah	Prov Sumbar	23 unit	200,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prov Sumbar	23 unit	200,000,000
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pembinaan, pengawasan barang milik daerah	Prov Sumbar	1 Lap	225,000,000	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prov Sumbar	1 Lap	225,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	Prov Sumbar	1 Lap	130,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prov Sumbar	1 Lap	130,000,000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>630.946.238</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>630.946.238</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas	Prov Sumbar	163 Stel	277.500,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov Sumbar	163 Stel	277.500,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai	Prov Sumbar	160 org	300,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov Sumbar	160 org	300,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya BinteK peraturan perundang-undangan	Prov Sumbar	15 org	53,446.238	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov Sumbar	15 org	53,446.238
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>2.948.693.200</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>2.948.693.200</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prov Sumbar	12 Bln	40,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov Sumbar	12 Bln	40,000,000

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Prov Sumbar	1 Paket	150,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov Sumbar	1 Paket	150,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	Prov Sumbar	1 Paket	200,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov Sumbar	1 Paket	200,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistic kantor	Prov Sumbar	1 paket	200,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov Sumbar	1 paket	200,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prov Sumbar	1 Paket	50,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prov Sumbar	1 Paket	50,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prov Sumbar	8 Eksp	25,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov Sumbar	8 Eksp	25,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Prov Sumbar	1 Lap	2,283,693,200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov Sumbar	1 Lap	2,283,693,200
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</b>			<b>1.300,000,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>1.300,000,000</b>
Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	Prov Sumbar	3 Unit	300,000,000	Pengadaan Mebel	Prov Sumbar	2 Set	300,000,000
Pengadaan kendaraan Dinas	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional	Prov SUmbara	2 Unit	400,000,000	Pengadaan kendaraan Dinas	Prov Sumbar		400,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	Prov Sumbar	5 Unit	400,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov Sumbar	3 Unit	400,000,000
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor	Prov Sumbar	1 Unit	200,000,000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Prov Sumbar	1 Unit	200,000,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</b>			<b>3.993.300.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>3.993.300.000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Prov Sumbar	1 Lap	7,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov Sumbar	1 Lap	7,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Prov Sumbar	12 Bulan	515,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov Sumbar	12 Bln	515,000,000

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Prov Sumbar	63 org	3.470.800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov Sumbar	63 org	3.470.800,000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik</b>			<b>1.454.200,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1.454.200,000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Prov Sumbar	1 Tahun	329,200,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov Sumbar	1 Thn	329,200,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	Prov Sumbar	1 Tahun	75,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov Sumbar	1 Thn	75,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prov Sumbar	1 Tahun	1.000,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov Sumbar	1 Thn	1.000,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Prov Sumbar	12 Bulan	550,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov Sumbar	12 Bln	550,000,000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Persentase efektifitas pengelolaan Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil</b>			<b>2.150.000,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>			<b>2.150.000,000</b>
<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>				<b>950.000,000</b>	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>			<b>950.000,000</b>
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya pengawasn pelaku usaha yang bergerak dibidang wisata bahari	7 Kab/Kota	7 kawasan pesisir	100,000,000	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	7 Kab/Kota	7 kawasan pesisir	100,000,000

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Terlaksananya penanaman pohon pelindung pantai	7 Kab/Kota	7 kawasan pesisir	600,000,000	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	7 Kab/Kota	7 kawasan pesisir	600,000,000
Rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil	Terlaksananya kegiatan transplantasi terumbu karang	Kab/Kota pesisir	1 Lokasi	250.000.000	Rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil	Kab/Kota pesisir	1 Lokasi	250.000.000
<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>				<b>1.200,000,000</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>			<b>1.200,000,000</b>
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya perlindungan nelayan	7 Kab/Kota	7 kawasan pesisir	1.050,000,000	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7 Kab/Kota	7 kawasan pesisir	1.050,000,000
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya pemberian sertifikat kecakapan bbelayan	7 Kab/Kota	7 kawasan pesisir	150,000,000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7 Kab/Kota	7 kawasan pesisir	150,000,000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap</b>			<b>17.407.770.900</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>			<b>17.407.770.900</b>
<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>				<b>15.082.029.200</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>			<b>15.082.029.200</b>
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data dan informasi sumberdaya ikan	Prov Sumbar	1 Dok	150,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Prov Sumbar	1 Dok	150,000,000

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya ketersediaan sarana perikanan tangkap	7 kawasan pesisir	Mesin tempel 15 PK (150 unit), mesin tempel 40 PK (10 unit), mesin tempel 8 PK (5 unit), mesin diesel kapal ( 20 unit), longtail 8.5 PK (30 unit), longtail (45 unit), Fish box 100 Ltr (700 unit), Fish box 50 ltr (150 unit), tramel net (100 unit), Gillnet (50 unit)	14,932,500,000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	7 kawasan pesisir	Mesin tempel 15 PK (150 unit), mesin tempel 40 PK (10 unit), mesin tempel 8 PK (5 unit), mesin diesel kapal ( 20 unit), longtail 8.5 PK (30 unit), longtail (45 unit), Fish box 100 Ltr (700 unit), Fish box 50 ltr (150 unit), tramel net (100 unit), Gillnet (50 unit)	14,932,500,000
<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>1,810,000,000</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>1,810,000,000</b>
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya ketersediaan sarana perikanan perairan umum	Kab. Tanah datar, Kab. Solok	Mesin tempel 30 unit, Gillnet 100 unit, Restocking, reservaat	1.925.741,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Tanah datar, Kab. Solok	Mesin tempel 30 unit, Gillnet 100 unit, Restocking, reservaat	1.925.741,000

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT				550,000,000	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			550,000,000
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya sosialisasi perizinan kapal	Prov Sumbar	1 Thn	250,000,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Prov Sumbar	1 Thn	250,000,000
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya penertiban perizinan kapal perikanan	Prov Sumbar	1 Thn	150,000,000	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Prov Sumbar	1 Thn	150,000,000
Rekomendasi Perizinan berusaha sub sector penangkapan dan pengangkutan ikan untuk kapal ukuran di Atas 5 GT-30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya penertiban perizinan kapal perikanan	Pessel	1 Thn	150,000,000	Rekomendasi Perizinan berusaha sub sector penangkapan dan pengangkutan ikan untuk kapal ukuran di Atas 5 GT-30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 Mil	Pessel	1 Thn	150,000,000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya</b>			<b>6.951.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>			<b>6.951.000.000</b>
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				125,000,000	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			125,000,000

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya sosialisasi perizinan usaha budidaya air laut dan payau	Kab. Pessel	1 Kali	125,000,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Kab. Pessel	1 Kali	125,000,000
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>				<b>1.350.000.000</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>			<b>1.350.000.000</b>
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya pengembangan ikan kerapu	19 Kab/Kota		1,000,000,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	19 Kab/Kota		1,000,000,000
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian HPI, Kesling	19 Kab/Kota		250,000,000	Pengelolaan Kesehatan Ikan & Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	19 Kab/Kota		250,000,000
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pelatihan CBIB, CPIB	19 Kab/Kota		100,000,000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	19 Kab/Kota		100,000,000
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan darat</b>				<b>5.476.100.800</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan darat</b>			<b>5.476.100.800</b>
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan sarana pembudidayaan ikan air tawar, payau	19 Kab/Kota	1 Paket	5.476.100.800	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kab/Kota	19 Kab/Kota	1 Paket	5.476.100.800
<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>9.823.622.300</b>				<b>9.823.622.300</b>

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>				<b>9.832.622.300</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>			<b>9.832.622.300</b>
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengawasan ruang laut	Prov Sumbar	1 Thn	100,000,000	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Prov Sumbar	1 Thn	100,000,000
Operasi kapal pengawas kelautan dan perikanan	Terlaksananya pengawasan kelautan dan perikanan	Prov Sumbar	1 Thn	3,000,000,000	Operasi kapal pengawas kelautan dan perikanan	Prov Sumbar	1 Thn	3,000,000,000
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya forum dan pperlengkapan Pokmaswas	Prov Sumbar	1 Thn	360,000,000	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Prov Sumbar	1 Thn	360,000,000
Perawatan kapal pengawas kelautan dan perikanan	Terlaksananya perawatan kapal pengawas	Prov Sumbar	1 Thn	200,000,000	Perawatan kapal pengawas kelautan dan perikanan	Prov Sumbar	1 Thn	200,000,000
Pengadaan kapal Pengawas	Terlaksananya pengadaan kapal pengawas	Prov Sumbar	1 Unit	5.538.622.300	Pengadaan kapal Pengawas	Prov Sumbar	1 Unit	5.538.622.300
Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Terlaksananya penyusunan naskah akademik Ranperda sanksi pengawasan	Prov Sumbar	1 Thn	150,000,000	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Prov Sumbar	1 Thn	150,000,000
<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>475,000,000</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>475,000,000</b>

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Terlaksananya pengawasan peredaran benih	Prov Sumbar	1 Thn	475,000,000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Prov Sumbar	1 Thn	475,000,000
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Persentase produksi olahan perikanan</b>			<b>4.300.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>			<b>4.300.000.000</b>
<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>1.050,000,000</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>1.050,000,000</b>
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penyediaan data KP	Prov Sumbar	1 Thn	1.050,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prov Sumbar		1.050,000,000
<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>				<b>1,400,000,000</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>			<b>1,400,000,000</b>

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya kegiatan diversifikasi pengolahan	Prov Sumbar	100 enterpreneu r, Demo olahan produk perikana	500,000,000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Prov Sumbar	100 enterpreneu r, Demo olahan produk perikana	500,000,000
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya peningkatan jaminan mutu	Prov Sumbar	50 enterpreneu r, bantuan sarana non konsumsiper temuan sosialisasi	900,000,000	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Prov Sumbar	50 enterpreneu r, bantuan sarana non konsumsiper temuan dan sosialisasi	900,000,000
<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>1,850,000,000</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>1,850,000,000</b>
Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya peningkatan pemasaran hasil perikanan	Prov Sumbar	Lomba PAUD, Lomba Masakana KeluargaPembinaan Stunting	1,850,000,000	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prov Sumbar	Lomba PAUD, Lomba Masakana KeluargaPembinaan Stunting	1,850,000,000
<b>UPTD</b>				<b>28.316.304.316</b>				<b>28.316.304.316</b>
<b>UPTD BPBALP</b>				<b>5.151.000.000</b>				<b>5.151.000.000</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>				<b>4.050.000.000</b>				<b>4.050.000.000</b>

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>				<b>4.445.992.800</b>				<b>4.445.992.800</b>
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pelatihan teknis/magang ikan laut	BPBALP		500,000,000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	BPBALP		500,000,000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya produksi benih ikan laut	BPBALP		1.145.992,800	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	BPBALP		1.145.992,800
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya sarana prasarana	BPBALP		2.800,000,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	BPBALP		2.800,000,000
<b>Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>				<b>707.007.200</b>	<b>Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>			<b>707.007.200</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	BPBALP	12 Bulan	360,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBALP	12 Bulan	360,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi listrik/bangunan kantor	BPBALP	12 Bulan	22,838,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBALP	12 Bulan	22,838,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	BPBALP	12 Bulan	84,800,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBALP	12 Bulan	84,800,000
Pengadaan mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	BPBALP	1 Paket	149.756.000	Pengadaan mebel	BPBALP	12 Bulan	149.756.000
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	BPBALP	1 Paket	87.613.200	Pengadaan mebel	BPBALP	12 Bulan	87.613.200
<b>UPTD KPSDKP</b>				<b>5.930.890.400</b>				<b>5.930.890.400</b>

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>				1,500,000,000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>			1,500,000,000
<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>				1,500,000,000	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>			1,500,000,000
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya pengawasn pelaku usaha yang bergerak dibidang wisata bahari	7 Kab/Kota	7 kawasan pesisir	1.500.000.000	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	7 Kab/Kota	7 kawasan pesisir	1.500.000.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>				600,000,000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>			600,000,000
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>				600,000,000	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>			600,000,000
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan jenis ikan	KPSDKP	1 Paket	600.000.000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kab/Kota	KPSDKP	1 Paket	600.000.000
<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				700.000.000	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			700.000.000
<b>Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>				700,000,000	<b>Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>			700,000,000

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Pengawasan usaha pemanfaatan sumberdaya kelautan kewenangan Provinsi	Terlaksananya operasional KKPD	KPSDKP	1 THn	700.000.000	Pengawasan usaha pemanfaatan sumberdaya kelautan kewenangan Provinsi	KPSDKP	1 THn	700.000.000
				<b>3.130.890.400</b>				<b>3.130.890.400</b>
<b>Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>					<b>Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	KPSDKP	12 Bulan	295.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KPSDKP	12 Bulan	295.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi listrik/bangunan kantor	KPSDKP	12 Bulan	12.727.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KPSDKP	12 Bulan	12.727.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	KPSDKP	12 Bulan	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KPSDKP	12 Bulan	25.000.000
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	KPSDKP	1 tahun	2.700.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	KPSDKP	1 tahun	2.700.000.000
Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan mesin	KPSDKP	1 tahun	9.150.000	Pemeliharaan/rehabilitasi asi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	KPSDKP	1 tahun	9.150.000
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan mesin	KPSDKP	1 tahun	89.013.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	KPSDKP	1 tahun	89.013.000
				<b>2.007.000.000</b>				<b>2.007.000.000</b>
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>				<b>1.747.102.540</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>			<b>1.747.102.540</b>

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>				<b>1.747.102.540</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>			<b>1.747.102.540</b>
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana laboratorium	PPMHP	12 Bulan	1.047.102.540	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	PPMHP	12 Bulan	1.047.102.540
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya sosialisasi dan pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan	PPMHP	12 Bulan	700.000.000	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	PPMHP	12 Bulan	700.000.000
<b>Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>				<b>259.897.460</b>	<b>Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>			<b>259.897.460</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	PPMHP	12 Bulan	100.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PPMHP	12 Bulan	100.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi listrik/bangunan kantor	PPMHP	12 Bulan	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PPMHP	12 Bulan	3.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	PPMHP	12 Bulan	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PPMHP	12 Bulan	15.000.000

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	PPMHP	1 tahun	25.250.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	PPMHP	1 tahun	25.250.000
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	PPMHP	1 tahun	106.647.460	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	PPMHP	1 tahun	106.647.460
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		PPMHP	1 tahun	10.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	PPMHP	1 tahun	10.000.000
<b>UPTD PPW I</b>				<b>5.942.992.000</b>	<b>5.942.992.000</b>			
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>				<b>4.625.000.000</b>	<b>4.625.000.000</b>			
<b>Penertiban izin usaha perikanan tangkap untuk kapa perikanan berukuran diatas 10 GT samapai dengan 30 GT</b>				<b>300.000,000</b>	<b>300.000,000</b>			
Rekomendasi perizinan berusaha subsector penangkapan dan pengangkutan ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT-30 GT ddan beroperasi sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya rekomendasi perizinan penangkapan ikan	PPW I Carocok	1 Thn	300.000.000	Rekomendasi perizinan berusaha subsector penangkapan dan pengangkutan ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT-30 GT ddan beroperasi sampai dengan 12 Mil	PPW I Carocok	5 Unit	300.000.000
<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>				<b>4,325,000,000</b>	<b>4,325,000,000</b>			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya penyediaan sapras Pelabuhan PPW I	PPW I Carocok	5 Unit	2.825.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PPW I Carocok	5 Unit	2.825.000.000
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya pelaksanaan fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan wilayah I	Carocok	12 Bulan	1,500,000,000	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Carocok	12 Bulan	1,500,000,000

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

<b>Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>				<b>1.317.992.000</b>	<b>Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>			<b>1.317.992.000</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Carocok	12 Bulan	448.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Carocok	12 Bulan	448.000.000
Pengadaan mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	Carocok	1 Paket	438.500.000	Pengadaan mebel	Carocok	12 Bulan	438.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Carocok	12 Bulan	57.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Carocok	12 Bulan	57.000.000
Pengadaan peralatan mesin lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan mesin	Carocok	1 tahun	112.992.000	Pengadaan peralatan mesin lainnya	Carocok	1 tahun	112.992.000
Penyediaan bahan logistic kantor	Tersedianya bahan logistik	Carocok	1 tahun	150.000.000	Penyediaan bahan logistic kantor	Carocok	1 tahun	150.000.000
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional	Carocok	1 Paket	61.500.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Carocok	1 Paket	61.500.000
Pemeliharaan rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rehab Gedung kantor	Carocok	1 Paket	50.000.000	Pemeliharaan rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Carocok	1 Paket	50.000.000
<b>UPTD PPW II</b>				<b>5,192,121,916</b>	<b>UPTD PPW II</b>			<b>5,192,121,916</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>				<b>3.379.954.276</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>			<b>3.379.954.276</b>
<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>				<b>3,379,954,276</b>	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>			<b>3,379,954,276</b>
Penyediaan Sarana Prasarana Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan Perikanan wilayah II	Air Bangis	13 Kegiatan	1,892,447,929	Penyediaan Sarana Prasarana Pelabuhan Perikanan	Air Bangis	13 Kegiatan	1,892,447,929

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya pelaksanaan fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan wilayah II	Air Bangis	3 Kegiatan	1,487,506,347	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Air Bangis	3 Kegiatan	1,487,506,347
<b>Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>				<b>1,812,167,640</b>	<b>Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>			<b>1,812,167,640</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Air Bangis	12 Bulan	756,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air Bangis	12 Bulan	756,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi listrik/bangunan kantor	Air Bangis	12 Bulan	7,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Air Bangis	12 Bulan	7,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Air Bangis	12 Bulan	35,700,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Air Bangis	12 Bulan	35,700,000
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan mesin	Air Bangis	1 tahun	391,028,000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Air Bangis	1 tahun	391,028,000
Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Air Bangis	1 tahun	245,103,104	Penyediaan bahan logistik kantor	Air Bangis	1 tahun	245,103,104
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional	Air Bangis	1 Paket	92,826,000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Air Bangis	1 Paket	92,826,000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan mesin	Air Bangis	1 Paket	72,430,000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Air Bangis	1 Paket	72,430,000
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor	Air Bangis	1 Paket	116,922,780	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Air Bangis	1 Paket	116,922,780
Pengadaan mebel	Terlaksananya pengadaan mebel'	Air Bangis	1 Paket	102,157,756	Pengadaan mebel	Air Bangis	1 Paket	102,157,756
<b>UPTD PPW III</b>				<b>4,092,300,000</b>	<b>UPTD PPW III</b>			<b>4,092,300,000</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>				<b>2,650,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>			<b>2,650,000,000</b>

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>				<b>2,650,000,000</b>	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>			<b>2,650,000,000</b>
Penyediaan Sarana Prasarana Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan Perikanan wilayah III	Sikakap	10 Kegiatan	1,650,000,000	Penyediaan Sarana Prasarana Pelabuhan Perikanan	Sikakap	10 Kegiatan	1,650,000,000
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya pelaksanaan fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan wilayah III	Sikakap	12 Bulan	1,000,000,000	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Sikakap	12 Bulan	1,000,000,000
<b>Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>				<b>1,442,300,000</b>	<b>Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>			<b>1,442,300,000</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Sikakap	12 Bulan	300,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sikakap	12 Bulan	300,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi listrik/bangunan kantor	Sikakap	12 Bulan	50,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sikakap	12 Bulan	50,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Sikakap	12 Bulan	2,300,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sikakap	12 Bulan	2,300,000
Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Sikakap	1 tahun	30,000,000	Penyediaan bahan logistik kantor	Sikakap	1 tahun	30,000,000
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas	Sikakap	1 Paket	450,000,000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Sikakap	1 Paket	450,000,000
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan mesin	Sikakap	1 Paket	212,000,000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Sikakap	1 Paket	212,000,000
Pengadaan mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	Sikakap	1 Paket	398,000,000	Pengadaan mebel	Sikakap	1 Paket	398,000,000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>101,392,211,000</b>	<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>101,392,211,000</b>

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Provinsi Sumatera Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
<b>NIHIL</b>					

**III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus menyusun Rencana Pembangunan Strategis yang mencakup Rencana Program/Kegiatan, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis sebagai pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang diembannya, kemudian juga ditegaskan dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 4 ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun.

Oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai OPD yang membidangi Sektor Kelautan dan Perikanan dalam menunjang Pembangunan Sumatera Barat harus menyusun Rencana Program dan Kegiatan (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi setiap tahunnya. Dalam penyusunan (RENJA) ini, Dinas Kelautan dan Perikanan harus berpedoman pada tingkat Hirarki Renstra yang lebih tinggi, diantaranya Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dan Renstra Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Penyusunan RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melakukan Koordinasi – Integrasi – Sinkronisasi dan Sinergisitas ( KISS) dengan Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan DKP di tingkat daerah secara intentif. Hal ini bertujuan untuk menghimpun permasalahan –

permasalahan yang dihadapi oleh kab/Kota dan issue strategis yang sedang berkembang sehingga RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang dibuat dapat menjawab permasalahan dan tantangan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden yang terkait dengan sector kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan.
2. Mongoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan 5 arah kebijakan di atas, KKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas adalah : Memperbaiki

komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan,

1. Pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
  - a. Membuka komunikasi dengan *stakeholders* untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual;
  - b. Transformasi kelembagaan dan fungsi WPP serta penguatan data stock sumberdaya ikan;
  - c. Perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait
  - d. Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (Major Project RPJMN 2020-2024), dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha.
  - e. Eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas. Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, serta optimalisasi peran BLU-LPMUKP/Bank Nelayan.
  - f. Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, perlindungan HAM Perikanan;
  - g. Penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project* RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BUMN, Pemerintah Daerah dan Swasta;

- h. Pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD);
  - i. Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan;
  - j. Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan Indonesia (RFMOs);
  - k. Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
  - l. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
  - m. Penguatan Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
2. Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat melalui pengembangan industrialisasi perikanan budidaya yang berkelanjutan didukung dengan modernisasi teknologi dan manajemen usaha yang efisien, kemudahan akses permodalan dan perizinan usaha, infrastruktur yang memadai, sarana input produksi yang bermutu, perlindungan usaha budidaya dan sinergisitas program dengan lintas sektor. Strategi yang akan dilaksanakan adalah :
- a. Akselerasi peningkatan produksi *aquaculture*/perikanan budidaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya;
  - b. Pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (Major Project RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha/swasta;
  - c. Pengembangan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting di semua tipologi ekosistem yaitu laut, payau dan tawar untuk pemenuhan konsumsi domestik, sumber devisa negara dan keberlanjutan lingkungan. Komoditas utama antara lain kerapu, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut;
  - d. Pengembangan pakan ikan mandiri yang terdiri dari pakan buatan

- dan pakan alami;
- e. Pengembangan sistem perbenihan ikan nasional melalui penguatan jejaring atau sistem logistik perbenihan nasional, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana balai benih ikan, unit perbenihan ikan di masyarakat, dan *broodstock center*, serta modernisasi teknologi;
  - f. Pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan termasuk di kawasan minapolitan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) didukung dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern;
  - g. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budidaya yang dilakukan antara lain melalui *surveillance* hama dan penyakit ikan, pengujian residu produk perikanan budidaya, modernisasi sarana laboratorium dan pembangunan pusat kesehatan ikan terpadu;
  - h. Pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya di bidang pembesaran, pembenihan, dan pakan;
  - i. Pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi, instalasi listrik, dan keramba jaring apung;
  - j. Peningkatan kerjasama dan sinergisitas kebijakan, program, anggaran dan data perikanan budidaya antara pusat dan daerah serta lintas sektoral di tingkat nasional maupun internasional;
  - k. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pemberian stimulus usaha, fasilitasi kema pembiayaan yang murah dan mudah, sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya serta pendampingan teknis;
  - l. Pengaturan akses perizinan dan investasi usaha perikanan budidaya yang mudah dan murah bagi pelaku usaha serta didukung dengan

- regulasi yang kondusif;
- m. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT);
  - n. Penguatan unit pelaksana teknis perikanan budidaya.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Perbaikan kualitas, kapasitas, dan produktifitas industri pengolahan ikan/udang dan rumput laut;
  - b. Meningkatkan produksi, produktifitas, standarisasi, ketelusuran (*traceability*), jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
  - c. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan system logistik ikan yang efisien, pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan, dan pemetaan logistik hasil Perikanan di daerah;
  - d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka, penguatan daya saing Unit Pengolahan Ikan(UPI);
  - e. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasilperikanan;
  - f. Peningkatan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;
  - g. Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi *stunting*;
  - h. Perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pengembangan sistem pemasaran produk berbasis digital, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan untuk skala internasional, penguatan *branding* produk perikanan kelautan Indonesia, pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor;
  - i. Pembinaan dan pengelolaan pasar ikan, pengembangan kawasan

- pengolahan, pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional (*Major Project*), dengan berkoordinasi dengan K/Lterkait, pemerintah daerah dan badan usaha;
- j. Pemetaan preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri;
  - k. Peningkatan partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan dan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG);
  - l. Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP, sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan;
  - m. Peningkatan unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil KP;
  - n. Pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju *zerowaste*;
  - o. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan;
  - p. Peningkatan ragam baru (diversifikasi) produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi industri rumput laut dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
  - q. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi, pembiayaan, teknologi dan pasar dan didukung regulasi yang kondusif;
  - r. Pelaksanaan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
  - s. Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi dan ketelusuran produk (*traceability*);
  - t. Pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi;

- u. Penguatan laboratorium acuan penyakit ikan karantina dan mutu hasil perikanan, serta jejaring laboratorium keamanan pangan hasil perikanan;
  - v. Peningkatan layanan sertifikasi ekspor/impор/domestik berbasis elektronik, penyederhanaan layanan serta pengembangan inovasi pelayanan publik;
  - w. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
  - X. Penguatan UPT mutu hasil perikanan dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan melalui upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
  - b. Perbaikan dan peningkatan kualitas ekosistem pesisir yang rusak melalui kegiatan rehabilitasi di WP3K
  - c. Pengelolaan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan;
  - d. Penanganan pencemaran laut dan sampah plastik;
  - e. Peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, rehabilitasi *mangrove* dan terumbu karang;
  - f. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan;
  - g. Penguatan Jejaring, Kemitraan / Kerjasama, dan peran KKP dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut
  - h. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar;
  - i. Peningkatan produksi dan usaha garam nasional, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan garam, dan peningkatan kualitas garam;

- j. Pembangunan sarana prasarana di kawasan wisata bahari;
- k. Peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi;
- l. Pengakuan dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- m. Pengelolaan biofarmakologi dan peningkatan pemanfaatan *marine bioproduct* dan bioteknologi, pengembangan rendah karbon pesisir dan laut;
- n. Penguatan Sistem Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut;
- o. Penyelesaian perencanaan ruang laut meliputi rencana zonasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Rencana Aksi dan Peninjauan Kembali serta penyesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang;
- p. Akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan PPK serta perairan di sekitarnya antara lain melalui pelaksanaan perizinan lokasi perairan dan penyelenggaraan kadas terlauti;
- q. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
- r. Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya);
- s. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP;
- t. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
- u. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- v. Operasional pengawasan ekspor, impor dan domestik;
- w. Harmonisasi Sistem Perkarantina dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri, sinergi pengawasan lalu lintas ikan, penguatan pengawasan karantina ikan di lintas batas negara

- (darat/laut), dan bandara/pelabuhan;
- x. Penguatan operasional pengawasan dan penindakan pelanggaran dibidang karantina ikan dan keamanan hayati ikan;
  - y. Peningkatan sarana dan prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, karantina ikan, dan laboratorium uji (*referenced and destructive fishing*); Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT);. Peningkatan UPT Pengelolaan Ruang Laut, UPT Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dan UPT Karantina Ikan.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Peningkatan riset untuk menyediakan data dan/informasi stock sumberdaya perikanan (*stock assessment*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI dan Perairan Umum Daratan (PUD);
  - b. Peningkatan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dan HKI (paten) dengan pemerintah daerah, UKM, dan dunia usaha dan industri;
  - c. Peningkatan dukungan riset dan teknologi dalam pengambilan kebijakan *science based policy*, untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan dan perikanan;
  - d. Peningkatan hasil riset dan inovasi teknologi yang mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, serta peningkatan adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan;
  - e. Pengembangan pusat unggulan riset sehingga menjadi *center of excellence* dalam riset dan inovasi teknologi kelautan dan perikanan;
  - f. Pengembangan kurikulum pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan *Teaching Factory* dan memperkuat *link and match* berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, serta menumbuhkan wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan;

- g. Pengembangan sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Nasional (SKKNI) dan Standar Internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F1995
- h. Pengembangan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri berkerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi bidang kelautan dan perikanan;
- i. Perluasan jangkauan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang berbasis digital (*e-learning, e-training, e-extension*);
- j. Pengembangan kelembagaan pendidikan vokasi, pelatihan dan riset kelautan dan perikanan;
- k. Penguatan sistem penyuluhan berbasis hasil riset (*REL/Research Extension Linked*) untuk mendukung program kementerian dan kebijakan peningkatan produktivitas perikanan dan kelautan, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- l. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai standard nasional dan internasional, termasuk peningkatan kapasitas tenaga peneliti, pendidik, pelatih, dan penyuluh;
- m. Peningkatan kerjasama dan sinergitas riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dengan lembaga nasional dan internasional;
- n. Peningkatan kapasitas UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Kelima arahan dan kebijakan strategis tersebut diatas juga diimplementasikan dalam renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yang untuk pencapaiannya tertuang dalam bentuk program dan kegiatan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan utama penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menjabarkan rencana pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan serta

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun sebelumnya. Dengan demikian keterkaitan antara Rencana Anggaran dan Penyusunan Anggaran dapat terjaga sehingga terwujudnya Anggaran berbasis Kinerja dalam suatu SKPD sesuai yang diamanatkan dalam Undang – undang No.17 tahun 2003 dan Undang – undang nomor 23 tahun 2014.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan ini secara makro adalah terjawabnya tantangan masalah pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir di Sumatera Barat yang menjadi agenda penting Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.

Sedangkan sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan secara partial antara lain :

- Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dan pendapatan pembudidaya ikan
- Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan pendapatan nelayan
- Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- Meningkatnya SDM Masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan
- Terciptanya lokasi – lokasi sentra produksi budidaya payau dan laut di Sumatera Barat.
- Meningkatnya pengawasan dan mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Meningkatnya diversifikasi produk dan peningkatan industri olahan hasil perikanan.

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu

2021 – 2026 Sebagai gambaran tentang apa yang diinginkan diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut sebagai visi provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan sampai akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD tahun 2021 – 2026

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

### ***“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”***

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dan Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019 – 2024 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025. Untuk memahami visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut :

#### ***Masyarakat Madani***

Sumatera Barat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter

dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

### ***Sumatera Barat Yang Unggul***

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

### ***Pembangunan Berkelanjutan***

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama kita dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan.

Untuk mencapai visi tersebut maka tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat terkait dalam pencapaian pada kata sejahtera. Dimana *Sejahtera* dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah

cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang sudah cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat. Disamping itu, pada masyarakat ini prasarana dan sarana pembangunan sudah mencukupi, lingkungan pemukiman telah tertata dengan baik serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah bagaimana pendapatan masyarakat meningkat dengan kedua misi diatas. Kondisi dimana mewujudkan ekonomi masyarakat yang tanggung, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Hal tersebut diwujudkan melalui program-program kegiatan yang mengarah kepada peningkatan produksi perikanan, pengembangan kawasan perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah serta pemasar ikan.

## **Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kelautan dan Perikanan dan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kelautan dan Perikanan, pembinaan dan fasilitasi bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan kesekretariatan Dinas, pelaksanaan tugas di bidang Kelautan, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan sektor Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 3 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 109 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, UPTD tersebut adalah : UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I, UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II, UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III, UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi adalah :

- a. Penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 3 Tahun 2020 tentang

uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas dijabat oleh : Dr. Ir. Reti Wafdah, M.Tp
2. Sekretariat, dijabat oleh : Resi Suriati, S.Pi, M.Si
3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dijabat oleh : Marwan, S.Pi, M.Si
4. Bidang Perikanan Tangkap, dijabat oleh : Sandi Waldi
5. Bidang Perikanan Budidaya, dijabat oleh : Ir. Noviyanti, MM
6. Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dijabat oleh : Yulia Madhona, S.Pi
7. UPTD terdiri dari :
  - a. UPTD PPW I, dijabat oleh Irwan, S.Pi
  - b. UPTD PPW II, dijabat oleh Hasnil Haris, S.Pi, M.Si
  - c. UPTD PPW III, dijabat oleh Yofrianto, S.St. Pi
  - d. UPTD KPSDKP, dijabat oleh Lastri Mulyanti, S.Pi, M.Si
  - e. UPTD BPBALP, dijabat oleh Wandu Afrizal, S.Pi
  - f. UPTD PPMHP, dijabat oleh Indra Arief Nasution, S.Pi,M.Si
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **FUNGSI**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi adalah :

- a. Penyelenggaraan Perumusan kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan

- d. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan dibidang kelautan dan perikanan yang diberikan Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi tersebut di atas adalah dalam rangka mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan Perikanan secara rasional, efisien dan berkelanjutan guna mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah bagian integral dari Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dimana secara luasan geografis menjadi sangat signifikan karena wilayah laut termasuk ZEE seluas 186.580 km<sup>2</sup> dan perairan umum (empat danau besar, sungai, telaga, waduk dan sejenisnya) seluas 62.400 km<sup>2</sup> jauh melebihi luas dari daratan Provinsi Sumatera Barat. Dengan luasan sedemikian ditambah besarnya potensi yang terkandung seperti sumberdaya ikan dan jasa lingkungan (wisata laut, resort, olahraga maritime dan lain-lain), tidak berlebihan rasanya kalau Bidang Kelautan dan Perikanan ini diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Sumatera Barat dimasa mendatang.

Sektor Kelautan dan Perikanan dalam perekonomian Sumatera Barat mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sumber lapangan kerja, sumber protein hewani yang berasal dari ikan dan sebagai penghasil devisa dengan pertimbangan mempunyai 185 buah pulau kecil dengan panjang pantai 375 km yang membentang dari Kabupaten Pasaman Barat hingga Kabupaten Pesisir Selatan serta 2,420 km jika termasuk pantai di Kepulauan Mentawai sehingga memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan perikanan tangkap. Selain Perikanan Tangkap, Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk pengembangan Perikanan Budidaya, baik perikanan air tawar, payau maupun laut. Hal ini didukung oleh adanya empat danau yang menyebar di Kab/Kota

diantaranya Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau di atas dan Danau di bawah, ditambah dengan kolam, waduk, embung dan sungai. Selain itu potensi budidaya payau dan laut yang terbentang dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir selatan. Potensi– potensi di atas belum termanfaatkan secara optimal sehingga belum terlihat dampak yang signifikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat terdapat 3 Misi yang menjadi target IKU DKP yaitu Misi ke 3, 4 dan 6. Misi tersebut di tuangkan dalam Program Unggulan. Program unggulan tersebut dituangkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-47-2021 tanggal 24 Januari 2021 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Rencana Tahun Anggaran 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi dana APBD sesuai RPJMD sebesar Rp. **101.392.211.000,-** yang terdiri dari 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan 5 Program Urusan .

# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**TABEL T.C.33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	<b>TOTAL PAGU</b>				101,392,211,000			120.571.576.392	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				32.443.412.684			36.086.941.432	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah			500,000,000			550,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan	Prov Sumbar	6 Dokumen	200,000,000		6 Dokumen	220,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	Prov Sumbar	1 Laporan	300,000,000		1 Laporan	330,000,000	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan			21.061.273.246			23.167.400.571	

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Prov Sumbar	198 orang	20.011.273.246		198 orang	22.012.400.571
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas pegawai	Prov Sumbar	42 org	900,000,000		42 org	990,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	Prov Sumbar	2 Dokumen	150,000,000		2 Dokumen	165,000,000
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</b>			<b>555,000,000</b>			<b>610,500,000</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah	Prov Sumbar	21 unit	200,000,000		21 unit	220,000,000
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Dearah	Terlaksananya pembinaan, pengawasan barang milik daerah	Prov Sumbar	1 Laporan	225,000,000		1 Laporan	247,500,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	Prov Sumbar	1 Laporan	130,000,000		1 Laporan	143,000,000
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>630.946.238</b>			<b>663.790.861</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas	Prov Sumbar	163 Stel	277.500,000		163 Stel	275.000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai	Prov Sumbar	160 org	300,000,000		160 org	330,000,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya BinteK peraturan perundang-undangan	Prov Sumbar	15 org	53.446.238		15 org	58.790.861
<b>1.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>2,948,693,200</b>			<b>3.124.000.000</b>

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prov Sumbar	12 Bln	40,000,000		12 Bln	44,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Prov Sumbar	1 Paket	150,000,000		1 Paket	165,000,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	Prov Sumbar	1 Paket	200,000,000		1 Paket	220,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	Prov Sumbar	1 paket	200,000,000		1 paket	220,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prov Sumbar	1 Paket	50,000,000		1 Paket	55,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prov Sumbar	8 Eksemplar	25,000,000		8 Eksemplar	27,500,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Prov Sumbar	1 Laporan	2,283,693,200		1 Laporan	2,392,500,000
<b>1.6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</b>			<b>1.300.000.000</b>			<b>1.430.000.000</b>
	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	Prov Sumbar	2 Set	300,000,000		2 Set	330,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	Prov Sumbar	3 Unit	400,000,000		3 Unit	440,000,000
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor	Prov Sumbar	1 Unit	200,000,000		1 Unit	220,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional	Prov Sumbar	1 Unit	400,000,000			440,000,000

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

<b>1.7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</b>			<b>3.993.300.000</b>				<b>4.533.750.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Prov Sumbar	400 surat	7,500,000			400 surat	8,250,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Prov Sumbar	12 Bulan	515,000,000			12 Bulan	565,500,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Prov Sumbar	63 org	3,470,800,000			63 org	3,960,000,000
<b>1.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik</b>			<b>1,454,200,000</b>				<b>2.007.500.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Prov Sumbar	1 Tahun	329,200,000			1 Tahun	220,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	Prov Sumbar	1 Tahun	75,000,000			1 Tahun	82,500,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prov Sumbar	1 Tahun	1,000,000,000			1 Tahun	1,650,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Prov Sumbar	12 Bulan	50,000,000			12 Bulan	55,000,000
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Persentase efektifitas pengelolaan Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil</b>			<b>2,150,000,000</b>				<b>2.365.000.000</b>

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

<b>1</b>	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>				<b>950,000,000</b>				<b>1.045.000.000</b>
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi	7 kawasan pesisir		100,000,000				110,000,000
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Terlaksananya penanaman pohon pelindung pantai	7 kawasan pesisir		600,000,000				660,000,000
	Rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil	Terlaksananya rehabilitasi wilayah pesisir	7 kawasan pesisir		250,000,000				275,000,000
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>				<b>1,200,000,000</b>				<b>1,320,000,000</b>
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya perlindungan nelayan	7 kawasan pesisir		1,050,000,000				1,155,000,000
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya pemberian sertifikat kecakapan bbelayan	7 kawasan pesisir		150,000,000				165,000,000
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap</b>			<b>17,407,770,900</b>				<b>20.611.250.000</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>				<b>15,082,029,200</b>				<b>17,047,250,000</b>
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data dan informasi sumberdaya ikan	Prov Sumbar	1 Dokumen	150.000.000			1 Dokumen	181.500.000

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya ketersediaan sarana perikanan tangkap	7 kawasan pesisir	Pengadaan mesin tempel 15 PK (315 unit), mesin tempel 40 PK (54 unit), mesin tempel 8 PK (15 unit), mesin diesel kapal ( 20 unit), longtail 9 PK (30 unit), longtail 13 PK (30 unit), GPS Garmin (20 unit), Fish box 100 Ltr (800 unit), Fish box 220 ltr (150 unit), tramel net (150 unit), Gillnet (150 unit), Rumah ikan (2 unit)	14,932,029,200		Pengadaan mesin tempel 15 PK (315 unit), mesin tempel 40 PK (54 unit), mesin tempel 8 PK (15 unit), mesin diesel kapal ( 20 unit), longtail 9 PK (30 unit), longtail 13 PK (30 unit), GPS Garmin (20 unit), Fish box 100 Ltr (800 unit), Fish box 220 ltr (150 unit), tramel net (150 unit), Gillnet (150 unit), Rumah ikan (2 unit)	16,865,750,000
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>1,925,741,700</b>			<b>3,124,000,000</b>
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya ketersediaan sarana perikanan perairan umum	Kab. Tanah datar, Kab. Solok		1,925,741,700			3,124,000,000

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

<b>3</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>				<b>150,000,000</b>				<b>165,000,000</b>
	Rekomendasi perizinan berusaha subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT – 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya penertiban perizinan kapal perikanan	Prov Sumbar		150,000,000				165,000,000
<b>4</b>	<b>Pendaftaran Kapal Perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>				<b>250,000,000</b>				<b>275,000,000</b>
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya sosialisasi perizinan kapal	Prov Sumbar		250,000,000				275,000,000
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya</b>			<b>6,951,100,800</b>				<b>8.030.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>125,000,000</b>				<b>137,500,000</b>
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya sosialisasi perizinan usaha budidaya air laut dan payau	Kab. Pessel		125,000,000				137,500,000
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>				<b>1,350,000,000</b>				<b>1.265.000.000</b>
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya pengembangan ikan kerapu	19 Kab/Kota		1,000,000,000				880,000,000
	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian HPI, Kesling	19 Kab/Kota		250,000,000				275,000,000

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pelatihan CBIB, CPIB	19 Kab/Kota		100,000,000			110,000,000
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>				<b>5,476,100,800</b>			<b>6.627.500.000</b>
	Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar lintas daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan sarana pembudidayaan ikan air tawar, payau	19 Kab/Kota		5,476,100,800			6,627,500,000
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>9.823.622.300</b>			<b>11.858.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>				<b>9,348.622.300</b>			<b>11.335.500.000</b>
	Pengawasan usaha pemanfaatan sumberdaya kelautan kewenangan provinsi	Terlaksananya pengawasan ruang laut	Prov Sumbar		100,000,000			110,000,000
	Operasional kapal pengawasan kelautan dan perikanan	Terlaksananya pengawasan kelautan dan perikanan	Prov Sumbar		3,000,000,000			3,300,000,000
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya forum dan perlengkapan Pokmaswas	Prov Sumbar		360,000,000			610,500,000
	Perawatan kapal pengawas kelautan dan perikanan	Terlaksananya perawatan kapal pengawas			200,000,000			440,000,000
	Pengadaan kapal pengawas Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya pengadaan kapal pengawas	Prov Sumbar	1 Unit	5,538,622,300			6,600,000,000
	Penanganan perkara sanksi administrative bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Terlaksananya penanganan perkara sanksi	Prov Sumbar	1 Thn	150.000.000			275.000.000

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

<b>2</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>475,000,000</b>				<b>522,500,000</b>
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya sesuai dengan Kewenangannya	Terlaksananya pengawasan peredaran benih	Prov Sumbar		475,000,000				522,500,000
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Persentase produksi olahan perikanan</b>			<b>4.300.000.000</b>				<b>6,930,000,000</b>
<b>1</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>1,050,000,000</b>				<b>935,000,000</b>
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penyediaan data KP	Prov Sumbar		1,050,000,000				935,000,000
<b>2</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>				<b>1.400.000.000</b>				<b>3,520,000,000</b>
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya kegiatan diversifikasi pengolahan	Prov Sumbar	100 enterpreneur , Demo olahan produk perikanan	900,000,000			100 enterpreneur , Demo olahan produk perikanan	990,000,000

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya peningkatan jaminan mutu	Prov Sumbar	50 enterpreneur , bantuan sarana non konsumsi, pertemuan dan sosialisasi	500,000,000			50 enterpreneur , bantuan sarana non konsumsi, pertemuan dan sosialisasi	660,000,000
<b>3</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>1,850,000,000</b>				<b>2,475,000,000</b>
	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya peningkatan pemasaran hasil perikanan	Prov Sumbar	Lomba PAUD, Lomba Masakana Keluarga, Pembinaan Stunting	1,850,000,000			Lomba PAUD, Lomba Masakana Keluarga, Pembinaan Stunting	2,475,000,000
	<b>UPTD</b>				<b>28.316.304.316</b>				<b>34.690.384.960</b>
	<b>UPTD BPBALP</b>				<b>5.151.000.000</b>				<b>6.931.100.000</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>				<b>4.445.992.800</b>				<b>5.791.500.000</b>
	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>				<b>4,445,992,800</b>				<b>5,791,500,000</b>

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya ketersediaan prasarana pokok dan penunjang BPBALP	BPBALP	Sarana prasarana BPBALP (DED, UKL UPL, pembangunan gudang pakan	2.800,000,000		Sarana prasarana BPBALP (DED, UKL UPL, pembangunan gudang pakan	4.070,000,000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		BPBALP	Produksi benih ikan laut, vaname, pengembangan teknologi lobster, kekerangan dan operasional UPTD	1.145.992.800		Produksi benih ikan laut, vaname, pengembangan teknologi lobster, kekerangan dan operasional UPTD	1.171.500.000
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya peningkatan kompetensi dan keahlian SDM pelaku usaha perikanan budidaya dan aparatur BPBALP dalam penguasaan dan penerapan budidaya air laut dan payau	BPBALP	Pelatihan teknis/magang ikan laut payau dan kerapu	500,000,000		Pelatihan teknis/magang ikan laut payau dan kerapu	550,000,000
<b>Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>				<b>705,007,200</b>			<b>1,139,600,000</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	BPBALP	12 Bulan	360.000.000		12 Bulan	396,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi listrik/bangunan kantor	BPBALP	12 Bulan	22,838,000		12 Bulan	385,000,000

## **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	BPBALP	12 Bulan	84,800,000			12 Bulan	110,000,000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	BPBALP	12 Bulan	87,613,200			12 Bulan	83,600,000
	Pengadaan mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	BPBALP	12 Bulan	149,756,000			12 Bulan	165,000,000
	<b>UPTD KPSDKP</b>				<b>5.930.890.400</b>				<b>7.020.065.360</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>				<b>1,500,000,000</b>				<b>1,650,000,000</b>
	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>				<b>1,500,000,000</b>				<b>1,650,000,000</b>
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		KPSDKP		1,500,000,000				1,650,000,000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>				<b>600,000,000</b>				<b>660,000,000</b>
	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>				<b>600,000,000</b>				<b>660,000,000</b>
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		KPSDKP		600,000,000				660,000,000
	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>700,000,000</b>				<b>770,000,000</b>

## **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

	<b>Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>				<b>700,000,000</b>				<b>770,000,000</b>
	Pengawasan Usaha Pemanfaatan sumberdaya kelautan kewenangan Provinsi	Operasional KKPD	KPSDKP		700,000,000				770,000,000
	<b>Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>				<b>3.130.890.400.</b>				<b>3.940.065.360</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	KPSDKP	12 Bulan	295,000,000			12 Bulan	159,500,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi listrik/bangunan kantor	KPSDKP	12 Bulan	12,727,400			12 Bulan	14,000,360
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	KPSDKP	12 Bulan	25,000,000			12 Bulan	27,500,000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		KPSDKP		89.013.000			12 Bulan	99.000.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		KPSDKP		9.150.000			12 Bulan	10.065.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya		KPSDKP	1 tahun	2.700.000.000			1 tahun	3.630.000.000
	<b>UPTD PPMHP</b>				<b>2.007.000.000</b>				<b>2.768.700.000</b>
	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>				<b>1.747.102.540</b>				<b>1.870.000.000</b>

## **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>				<b>1.747.102.540</b>				<b>1.870.000.000</b>
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana laboratorium	PPMHP	12 Bulan	700.000.000			12 Bulan	770.000.000
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya sosialisasi dan pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan	PPMHP	12 Bulan	1.047.102.540			12 Bulan	1.100.000.000
	<b>Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>				<b>259.897.460</b>				<b>898.700.000</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	PPMHP	12 Bulan	100,000,000			12 Bulan	110.000,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi listrik/bangunan kantor	PPMHP	12 Bulan	3,000,000			12 Bulan	5,500,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	PPMHP	12 Bulan	15,000,000			12 Bulan	16,500,000
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	PPMHP	1 tahun	25,250,000			1 tahun	550,000,000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		PPMHP	1 tahun	10,000,000			1 tahun	11,000,000

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		PPMHP	1 tahun	106.647.460		1 tahun	205.700.000
	<b>UPTD PPW I</b>				<b>5.942.992.000</b>			<b>7.439.291.200</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>				<b>4.625.000.000</b>			<b>5.417.500.000</b>
	<b>Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pelabuhan perikanan Provinsi</b>				<b>4.325.000.000</b>			<b>4.867.500.000</b>
	Penyediaan sarana dan Prasarana Pelabuhan	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan Perikanan wilayah I	Carocok	3 Kegiatan	2.825.000.000		3 Kegiatan	2.667.500.000
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya pelaksanaan fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan wilayah I	Carocok	12 Bulan	1,500,000,000		12 Bulan	2,200,000,000
	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>				<b>300,000,000</b>			<b>550,000,000</b>
	Rekomendasi perizinan berusaha subsektor penangkapan dan pengakutan ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT – 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya penertiban perizinan kapal perikanan	Prov Sumbar		300,000,000			550,000,000
	<b>Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>				<b>1,317,992,000</b>			<b>2,021,791,200</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Carocok	12 Bulan	448,000,000		12 Bulan	492,800,000

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional	Carocok	1 Unit	61,500,000		12 Bulan	440,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Carocok	12 Bulan	57,000,000		12 Bulan	62.700.000
Pengadaan mebel	Pemeliharaan gedung kantor	Carocok	1 tahun	438.500.000		1 tahun	550,000,000
Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik	Carocok	1 tahun	150.000.000		1 tahun	165.000.000
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya peralatan dan mesin	Carocok	1 Paket	112.992.000		1 Paket	256.291.200
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya peralatan dan mesin	Carocok	1 Paket	50.000.000		1 Paket	55.000.000
<b>UPTD PPW II</b>				<b>5.192.121.916</b>			<b>6.172.014.200</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>				<b>3.379.954.276</b>			<b>4.490.200.000</b>
<b>Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pelabuhan perikanan Provinsi</b>				<b>3,379,954,276</b>			<b>4,490,200,000</b>
Penyediaan sarana dan Prasarana Pelabuhan	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan Perikanan wilayah II	Air Bangis	13 Kegiatan	1,892,447,929		13 Kegiatan	1,870,000,000
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya pelaksanaan fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan wilayah II	Air Bangis	3 Kegiatan	1,487,506,347		3 Kegiatan	2,620,200,000
<b>Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>				<b>1.812.167.640</b>			<b>1.681.814.200</b>

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Air Bangis	12 Bulan	756.000.000		12 Bulan	831.600.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Air Bangis	12 Bulan	35.700.000		12 Bulan	20.900.000
Penyediaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pemeliharaan gedung kantor	Air Bangis	1 tahun	92.826.000		1 tahun	121.000.000
Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik	Air Bangis	1 tahun	245.103.104		1 tahun	275.000.000
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya peralatan dan mesin	Air Bangis	1 Paket	391.028.000		1 Paket	276.014.200
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Air Bangis	1 Paket	116.922.780		1 Paket	82.500.000
Pengadaan mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	Air Bangis	1 Paket	102.157.756		1 Paket	276.014.200
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pengadaan mebel	Air Bangis	1 Paket	72.430.000		1 Paket	74.800.000
<b>UPTD PPW III</b>				<b>4.092.300.000</b>			<b>4.359.214.200</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>				<b>2.650.000,000</b>			<b>2,915,000,000</b>
<b>Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pelabuhan perikanan Provinsi</b>				<b>2.650.000,000</b>			<b>2.915.000.000</b>
Penyediaan sarana dan Prasarana Pelabuhan	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan Perikanan wilayah III	Sikakap	10 Kegiatan	1,650,000,000		10 Kegiatan	1,815,000,000

## **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya pelaksanaan fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan wilayah III	Sikakap	12 Bulan	1.000.000.000			12 Bulan	1.100.000.000
	<b>Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>				<b>1.442.300.000</b>				<b>1.444.214.200</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Sikakap	12 Bulan	300,000,000			12 Bulan	330,000,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi listrik/bangunan kantor	Sikakap	12 Bulan	50,000,000			12 Bulan	55,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Sikakap	12 Bulan	2,300,000			12 Bulan	22,000,000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik	Sikakap	1 tahun	30,000,000			1 tahun	33,000,000
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas	Sikakap	1 Paket	450.000.000			1 Paket	495.000.000
	Pengadaan mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	Sikakap	1 Paket	398.000.000			1 Paket	276.014.200
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	Sikakap	1 tahun	212,000,000			1 tahun	233,200,000
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>101,392,211,000</b>				<b>120.571.576.392</b>

**IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD  
TAHUN 2025****4.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah mengakomodir usulan yang masuk dari pemangku kepentingan baik berupa usulan masyarakat melalui Lembaga Legislatif maupun usulan dari daerah yang langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Musrenbang Kab/Kota dan Provinsi sesuai dengan kebutuhan potensi yang ada.

Tahun 2025 usulan dari pemangku kepentingan diakomodir melalui program dan kegiatan yang ada di dalam sistem perencanaan dan penyusunan program/kegiatan dan anggaran yang disesuaikan dengan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

**4.2. Rencana Program dan Kegiatan 2025**

Dalam rangka mendorong Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun beberapa rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Dalam upaya meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan, peningkatan produksi perikanan, peningkatan nilai tambah dan mutu hasil perikanan dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan maka beberapa program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan antara lain adalah :

1. **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** dengan kegiatan utama peningkatan alat tangkap nelayan dan penggunaan sarana mesin tempel, mesin longtail, fish box, rumpon serta peningkatan sarana dan prasarana pada pelabuhan perikanan.
2. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**, dengan kegiatan utama pembinaan, pemantauan kesehatan dan lingkungan ikan, Penerapan CBIB dan CPIB pada pembudidaya ikan.

3. **Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** dengan kegiatan utama Pengelolaan Kawasan Konservasi, peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengelolaan pulau-pulau kecil .
4. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** dengan kegiatan utama gerakan memasyarakatkan makan ikan, diversifikasi pengolahan hasil perikanan, peningkatan investasi sektor kelautan dan perikanan, serta peningkatan sarana pengolahan hasil perikanan serta pemasaran hasil perikanan.
5. **Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan** dengan kegiatan utama pelaksanaan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, Penindakan kasus illegal fishing dan pembinaan Pokmaswas.

Usulan anggaran untuk kegiatan Tahun 2025 per program adalah sebagai berikut :

No	Program	Usulan Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	29.253.246.000
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	4.400.000.000
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	40.417.189.000
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	11.496.622.000
5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	6.732.913.000
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	9.092.241.000
	<b>TOTAL</b>	<b>101.392.211.000</b>

Dalam rangka mendorong Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat, maka Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyusun beberapa

rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Kemendagri No : 050/5889 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
- 1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan :
    - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan :
    - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2. Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah
- 3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan :
    - 1. Pengamanan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
    - 2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah
    - 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan :
    - 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - 2. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
    - 3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 5. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan :
    - 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  3. Penyediaan peralatan rumah tangga
  4. Penyediaan bahan logistik kantor
  5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
6. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Sub Kegiatan :
1. Pengadaan mebel
  2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  4. Pengadaan kendaraan Dinas
7. Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8. Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- II PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**
1. Kegiatan : Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi
- Sub Kegiatan :
1. Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari

- pemerintah pusat
2. Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
2. Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- Sub Kegiatan :
1. Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau
  2. Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat
  3. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

### **III PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

1. Kegiatan : Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 mil
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan
  2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2. Kegiatan : Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi
- Sub Kegiatan :
1. Penjaminan ketersediaan usaha perikanan tangkap
3. Kegiatan : Penerbitan Izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai 30 GT
- Sub Kegiatan :
1. Penetapan persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
  2. Penerbitan Rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
4. Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
- Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Sarana dan Pelabuhan Perikanan
2. Pelaksanaan Fungsi Pemerintah dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

**IV PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**

1. Kegiatan : Penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi  
  
Sub Kegiatan :
  1. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan
2. Kegiatan : Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut  
Sub Kegiatan :
  1. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya iakn ikan di laut
  2. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut
  4. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut dan lintas daerah kabupaten/kota
  5. Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di laut dan dikawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi
3. Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat  
Sub Kegiatan :
  1. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

**V PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

1. Kegiatan : Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil  
Sub Kegiatan :
  1. Pengawasan usaha pemanfaatan sumberdaya kelautan kewenangan Provinsi
  2. Operasi kapal pengawas kelautan dan perikanan
  3. Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
  4. Penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)
2. Kegiatan : Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

- Sub kegiatan :
1. Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai dengan kewenangannya

**VI PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

1. Kegiatan : Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

- Sub kegiatan :
1. Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

2. Kegiatan : Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar

- Sub Kegiatan :
1. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar
  2. Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing

3. Kegiatan : Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

- Sub Kegiatan :
1. Pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

## V. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 ini merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dan merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran yang disusun oleh organisasi yang ada di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Untuk Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 dengan anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 101.392.211.000,-

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah Program Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikianlah penyusunan Renja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, kiranya dapat terlaksana untuk pencapaian tujuan SKPD dan mewujudkan Visi dan Misi Sumatera Barat.

Padang,       Maret 2024

Kepala  
Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Sumatera Barat

**Dr. Ir. RETI WAFDA, M.Tp**  
Pembina Utama Madya,  
NIP. 19670312 199308 2 002